



Analisis KR Politik Uang

Tunjung Sulaksono

WAJIB disyukuri Pilkada serentak 9 Desember 2015 berjalan relatif aman dan lancar. Patut juga diapresiasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat pun nampaknya cukup tinggi. Data yang masuk ke KPU, Rabu (9/12) malam menyebutkan, di 58 dari 264 daerah yang melaksanakan Pilkada, *voter's turnout*-nya mencapai 73,22%. Meski angka itu masih di bawah target KPU, 77,5%.

Pilkada serentak juga berlangsung penuh warna dan dinamika. Banyak sekali laporan dari daerah yang menunjukkan berbagai hambatan yang harus menjadi bahan evaluasi para penyelenggara Pemilu ke depan. Mulai dari surat suara yang kurang di Sumenep dan Sulawesi Tenggara, tidak terdistribusikannya formulir C6 ke calon pemilih di Kota Depok, penyalahgunaan hak pilih di Kota Denpasar, di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan di Kota Bandar Lampung. Hingga pengepungan Kantor PPK oleh sekelompok massa di Kabupaten Gowa.

Namun dari sekian banyak problem yang menodai kualitas pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, yang paling memprihatinkan maraknya kasus politik uang dengan segala variasinya, termasuk dengan menyisipkan uang di formulir C6 seperti yang

*Bersambung hal 8 kol 1

Politik Uang Sambungan hal 1

terjadi di Kabupaten Boyolali yang berhasil tertangkap tangan. Tidak hanya melibatkan kandidat dan warga, politik uang juga melibatkan para penyelenggara, seperti yang menimpa tiga anggota KPPS di Kota Semarang. Komisioner Bawaslu Nasrullah menuturkan, pihaknya menemukan praktik politik uang paling tidak di 29 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak, dan kemungkinan besar angka tersebut masih akan bertambah.

Semakin hari metode praktik politik uang semakin bervariasi. Politik uang tidak lagi hanya sekadar urusan antara kandidat dan calon pemilih yang kerap disebut *vote buying* (pembelian suara). Namun dalam banyak kasus para penyelenggara Pemilu juga dapat menjadi bagian dari praktik politik uang dengan misalnya menjadi *broker* praktik dagang suara. Apapun wujudnya, suatu praktik politik uang di dalamnya pasti melibatkan *patronage* dan klientilisme. *Patronage* yaitu pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu. Misalnya amplop berisi uang tunai dan kepada kelompok atau komunitas misalnya pemberian fasilitas umum untuk warga. Sementara klientilisme merupakan relasi kekuasaan yang bersifat paternalistik di mana keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Ada beberapa faktor mengapa Pilkada rawan politik uang. *Pertama* pragmatisme politik. Pilkada langsung tidak hanya melahirkan kandidat yang pragmatis, namun harus diakui bahwa pragmatisme dalam lingkup masyarakat juga terjadi. Survei Puskapol UI

akhir November lalu di Kota Depok mengungkap fakta bahwa pragmatisme ini cukup terasa. Sebanyak 41,5% responden cenderung pragmatis dan bersikap akan menerima uang jika ada tawaran, meskipun belum tentu akan memilih. Survey KPK pada 2013 terkait persepsi masyarakat juga mengungkap fakta, 71,72% publik menganggap politik uang adalah hal yang lazim. *Kedua*, sulitnya menindak praktik politik uang karena bukti formal untuk menjerat pihak yang terlibat sulit untuk didapatkan. Muaranya, efek jera yang diharapkan tidak bisa terwujud secara optimal.

Keberadaan politik uang telah menjungkirbalikkan ide mendasar dari demokrasi yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Politik yang seharusnya dimaknai sebagai aktivitas kolektif menuju kebaikan bersama telah direduksi menjadi sekadar proses transaksi untuk pemenuhan syahwat politik dan ekonomi segelintir orang berorientasi jangka pendek. Keberadaan politik uang juga menghalangi pengembangan *clean government* karena menyediakan pintu masuk bagi korupsi politik.

Agar tidak telanjur menjadi budaya politik, pemberantasannya harus sinergis dan simultan. Tidak cukup membuat regulasi, akan tetapi penegakannya menjadi prasyarat mutlak agar regulasi tersebut efektif. Tidak cukup menghukum semua yang terlibat, namun penciptaan kesadaran bersama tentang destruktifnya politik uang dan pentingnya politik bersih harus menjadi gerakan moral dan sosial yang melibatkan semua warga.

(Penulis adalah Dosen Ilmu Pemerintahan UMY dan peneliti Inspect-d